

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 kemarin, dunia digemparkan dengan kemunculan suatu virus yang disebut virus covid 19. Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-Co-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, penyakit karena infeksi virus ini disebut covid 19. virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus Covid 19 ini dapat menyebar secara cepat ke satu orang dengan orang yang lainnya melalui kontak fisik. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. virus ini dapat menyerang ke siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut) orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Hingga saat ini virus tersebut telah menyebar ke berbagai negara, salah satunya yaitu Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menjelaskan tentang tujuan penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah penyakit menular mempunyai 2 (dua) tujuan pokok, yaitu :

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memiliki hak dalam menentukan suatu kebijakan. Seperti halnya dalam menghadapi kasus Covid-19 di mana pemerintah dalam mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan yang ditujukan kepada publik. Kebijakan tersebut seperti penerapan protokol kesehatan, penerapan PSBB, penerapan PPKM, hingga vaksinasi.

Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini vaksin Covid-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19.

Program vaksinasi di Indonesia pertama kali dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 yang suntikan pertamanya diberikan kepada presiden Joko Widodo. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan

vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*). Selain itu, vaksinasi Covid-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 yaitu tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* (covid-19). Maka dari itu pemerintah memberlakukan kebijakan program vaksinasi di seluruh Indonesia.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak di persiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan program dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh atasan, undang-undang atau petisi negara yang nantinya akan dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat mencapai suatu target atau tidak.

Implementasi kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka di harapkan menjadi solusi untuk menyudahi pandemi covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat dari berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial hingga aktivitas sehari-hari sehingga apabila vaksinasi covid-19

ini berjalan sesuai target yaitu mencapai *herd immunity* maka dengan begitu keadaan dan pertumbuhan sosial di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka akan dapat berjalan dengan normal kembali begitupun dengan aktivitas masyarakat yang sudah sangat terganggu akibat adanya pandemi ini.

Kecamatan Ligung vaksinasi pertama kali di laksanakan pada tanggal 4 Februari 2021 hingga sampai saat ini terus berjalan, Di kecamatan Ligung menargetkan sebanyak 200 vaksin di setiap pelaksanaannya yang diberikan kepada Masyarakat, Vaksin ini rutin di laksanakan agar capaian target vaksinasi di Kabupaten Majalengka cepat tercapai. Selain itu masyarakat di himbau khususnya di wilayah Kecamatan Ligung yang telah divaksin untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan karena vaksin ini bukan obat melainkan hanya untuk kekebalan tubuh untuk mencegah penyebaran covid-19.

Desa Beber pelaksanaan vaksinasi pertama kali pada tanggal 9 Juni 2021 hingga sampai saat ini terus berjalan, pada bulan Juni desa beber masuk ke dalam zona orange yaitu di mana penyebaran covid-19 di wilayah ini relatif tinggi , hingga saat ini masyarakat di Desa Beber masih ada yg terkena virus covid-19 di karenakan Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap covid-19 dan Adanya Penyebaran hoax negatif kepada masyarakat terkait vaksinasi covid-19.

Dalam implementasi kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 di desa beber kecamatan ligung kabupaten majalengka diduga terjadi beberapa permasalahan yaitu :

1. Diduga masih kurangnya sosialisasi dari aparat desa kepada masyarakat terkait vaksinasi dalam penanganan covid-19.
2. Diduga masih Kurangnya informasi terkait pentingnya vaksinasi dalam penanganan covid-19.

Gejala-gejala tersebut diakibatkan implementasi kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 masih belum optimal. (*problem research*) pada hasil pengamatan awal peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa masih ada masyarakat yang menghiraukan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 ?
2. Apakah aparat desa sudah memberikan informasi secara mendalam kepada masyarakat terkait program vaksinasi dalam penanganan covid-19 ?

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang Implementasi kebijakan Program Vaksinasi dalam Penanganan Covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung untuk Mengetahui tingkat Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Vaksinasi dalam Penanganan Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang di hadapi yaitu “ Implementasi Kebijakan Program Vaksinasi dalam Penanganan Covid-19 di Desa Beber kecamatan Ligung “ Belum Optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis merumuskan Identifikasi masalah pada Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka ?
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program vaksinasi

dalam penanganan covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan program vaksinasi dalam penanganan covid-19 di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis agar penelitian yang kita lakukan dapat bermanfaat bukan saja untuk diri sendiri melainkan untuk orang lain yang membacanya. maka dari itu, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan teoritis

Diharapkan penulis agar penelitian yang bisa dilakukan memperkaya literature dan pengembangan ilmu yang ditekuni sehingga bisa bermanfaat dikemudian hari.

2) Kegunaan praktis

Yaitu kegunaan bagi institusi/ lembaga yang menjadi lokasi penelitian serta bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta (1986), Kata "*Public*" diindosiation menjadi "Publik" yang di artikan sebagai orang banyak (Umum), sesungguhnya pengertian "policy" itu merupakan tindakan pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas,

oleh karena itu ia merupakan *public policy* (kebijakan pemerintah, kebijakan umum, kebijakan negara). (Abduellah dan Yudi, 2016 : 16)

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan chandler dan plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. (Harbani pasolong 2019 : 46)

Menurut Thomas Dye sebagaimana di kutip oleh (Subarsono 2022 : 2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah menge tahu bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Easton dalam Leo Agustine (2017:16) mengatakan kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim dan sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai "rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya). pernyataan citacita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran".

Friedrich dalam Leo Agustino (2017:16) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : "serangkaian tindakan atau kegiatan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan".

Implementasi kebijakan, secara sederhana berarti pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut dari sesuatu yang normatif dan pasif menjadi sesuatu yang aktif, aktual atau fungsional. Oleh karena itu tahapan implementasi kebijakan sering disebut sebagai salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan jika dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. (Daradjat kartawidjaja 2018 : 76)

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. (Leo Agustino, 2020 144)

Implementasi kebijakan sebagai salah satu fokus dalam kebijakan publik dihadapkan pada masalah pilihan model, mana yang terbaik yang hendak dipakai. Setiap jenis kebijakan memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Ada kebijakan yang lebih tepat menggunakan model implementasi *top-down*, ada yang lebih tepat dengan model implementasi *bottom-up*, bahkan ada juga yang lebih tepat dengan menggabungkan atau memadukan kedua model yaitu bersifat *top-downer* dan *bottom upper*. (Rulinawaty Kasmad, 2013 : 12)

Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Studi implementasi kebijakan

dibagi ke dalam tiga generasi. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang berfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan, studi pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan locus (secara multilevel) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis. (Tresiana dan duadji 2019 : 4)

Lane dalam (Tresiana dan duadji 2019 : 3) berpendapat bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian, pertama: $implementation = F (Intention, Output, Outcome)$, artinya implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua: $implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)$, penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan program dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh atasan, undang-undang atau petisi negara yang nantinya akan dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat mencapai suatu target atau tidak.

Upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor-faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi.

Terkait serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para ahli, maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Berbagai peta tentang faktor-faktor

tersebut terakumulasi menjadi apa yang disebut model implementasi kebijakan. Model implementasi ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (Leo Agustino, 2020 : 154). Dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus pada empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi (*Communications*)
2. Sumber daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Dispositions atau Attitudes*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

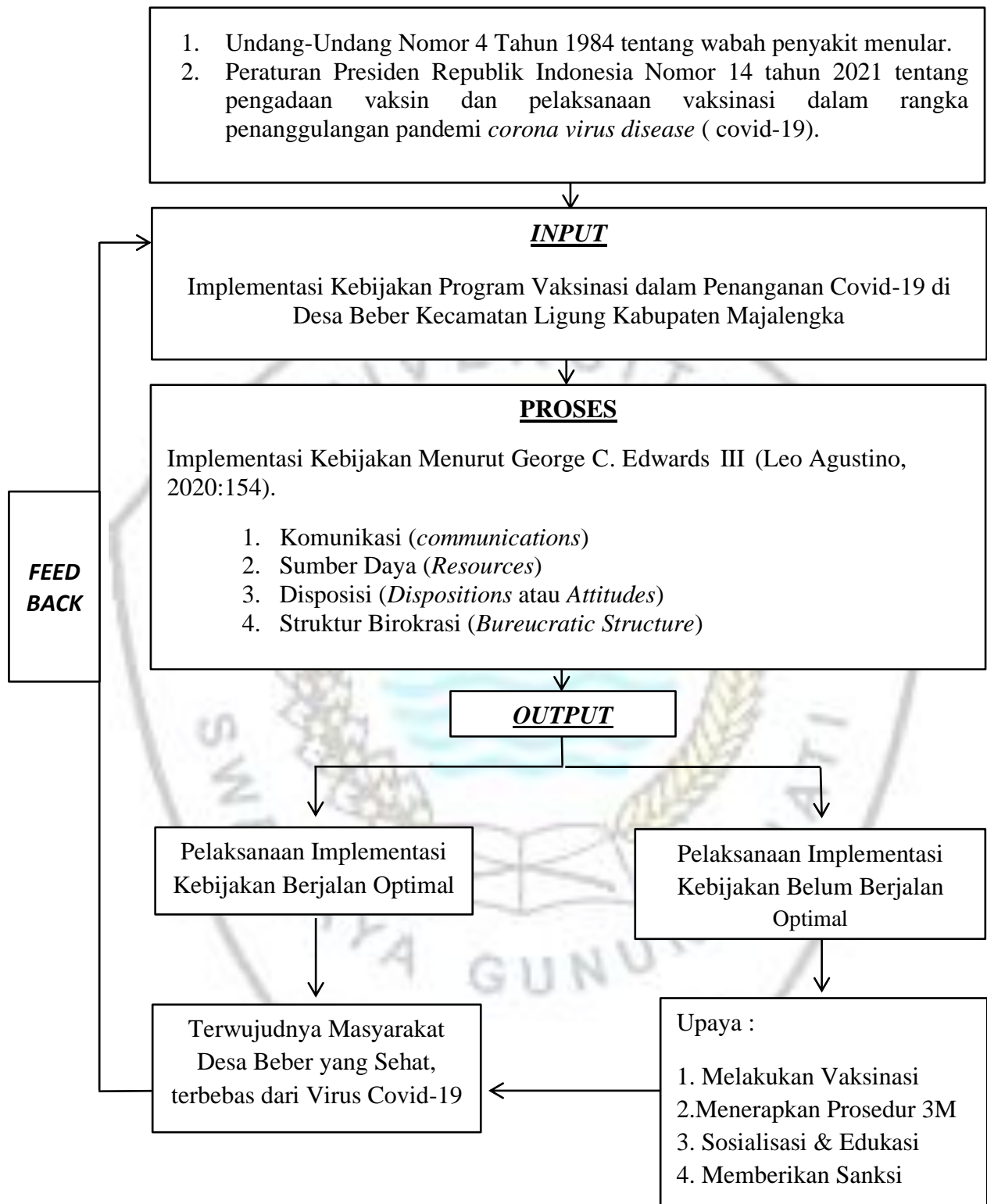
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular mendefinisikan bahwa wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Sesuai peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease* (covid-19). Dalam pasal 13A ayat (4) sanksi yang di berikan bagi setiap orang yang telah di tetapkan sebagai sasaran

penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana di maksud pada ayat 2 di kenakan sanksi administratif berupa penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda.



Hasil lainya kerangka pikiran penelitian seperti gambar berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, menurut Edward III dalam Leo Agustino (2020 : 154). untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi

Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. Sumber daya

Menurut Edward III Sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia atau *staff*, komunikasi, wewenang dan fasilitas (sarana dan prasarana).

c. Disposisi

Menurut Edward III disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya

harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam program vaksinasi dalam penanganan covid-19, masyarakat tidak lagi sebagai penonton dan menyerahkan semua urusan tersebut kepada pemerintah, tetapi di harapkan ikut dan menjalani program vaksinasi dalam penanganan covid-19 tersebut. Masyarakat harus menyadari bahwa penanganan virus ini merupakan tugas bersama.

Program vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan.. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19.

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

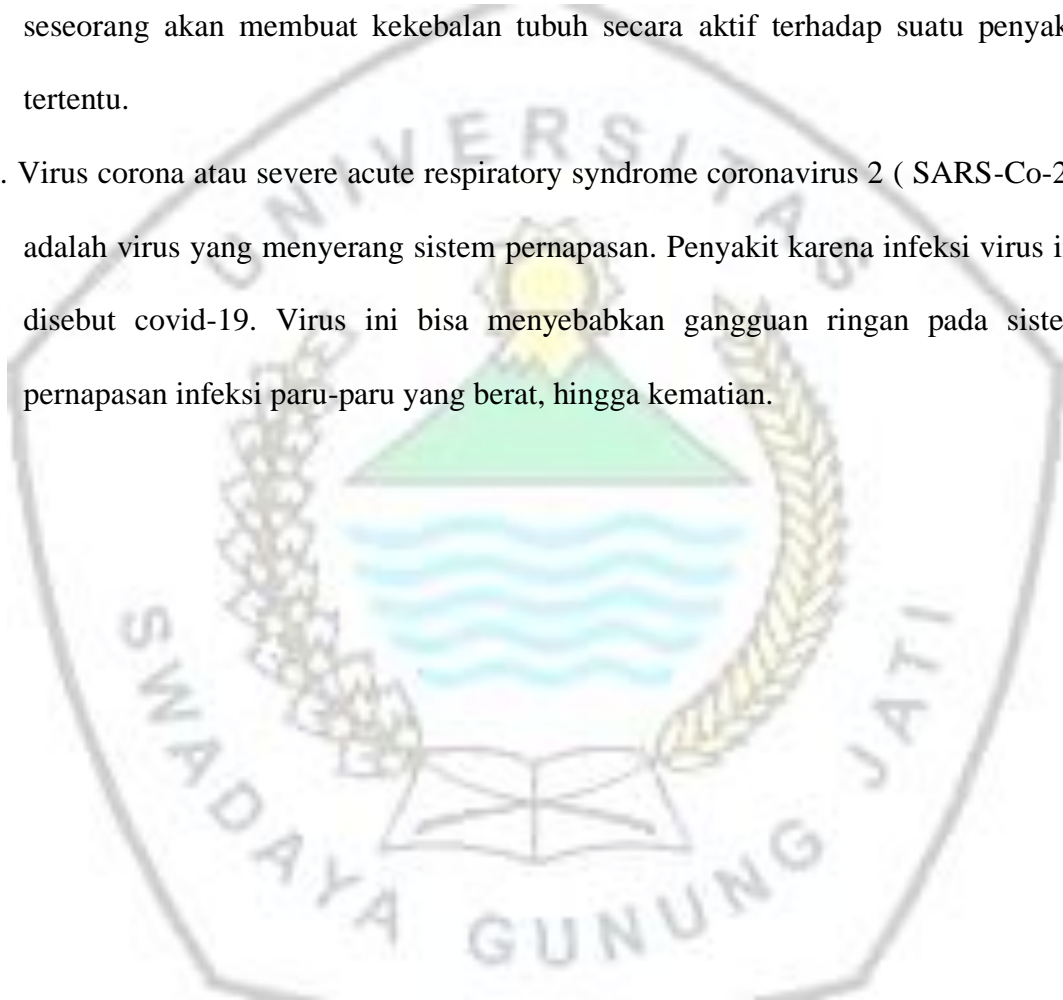
1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Konsep Penelitian yaitu menganalisis data berdasarkan kesimpulan teori yang sudah berlaku umum untuk mengamati suatu fenomena agar tidak terjadi tumpang tindih atas perhatian dan pemahaman atas permasalahan yang menjadi suatu subjek penelitian, maka untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang di pergunakan penulis :

- a. Implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan program dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh atasan, undang-undang atau petisi negara yang nantinya akan dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut dapat mencapai suatu target atau tidak.
- b. Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik.
- c. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu

penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

- d. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu.
- e. Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Co-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut covid-19. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.



1.7.2 Operasionalisasi konsep Penelitian

Berdasarkan operasionalisasi konsep penelitian menurut George C. Edward III sebagai berikut :

Tabel 1.1
Operasionalisasi konsep Penelitian

KONSEP	DIMENSI	PARAMETER
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III (Leo Agustino, 2020:154).	1.Komunikasi (<i>communications</i>)	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2.Sumber daya (<i>Resources</i>)	1. Staff 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3.Disposisi (<i>Dispositions</i> atau <i>Attitudes</i>)	1. Efek Disposisi 2. Melakukan Pengaturan Birokrasi 3. Insentif
	4. Struktur birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>)	1. Standar Operating Prosedures (SOPs) 2. Melaksanakan

		fragmentasi
--	--	-------------

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (hati-hati, kritis dalam mencari fakta, prinsip-prinsip) untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. metode ini lebih menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017 : 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di amati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

1) Informan Kunci (*Key Informan*)

Yaitu peneliti mencari orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang masalah-

masalah yang diteliti. informan kunci untuk penelitian ini yaitu segenap aparat desa beber Kecamatan ligung.

2) Informan pendukung (*supported informan*)

Yaitu peneliti mencari orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian informan pendukung untuk penelitian ini yaitu tentunya warga desa beber.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan yaitu teknik *purposive* (*purposive sampling*), dimana peneliti memilih dan menetapkan secara sengaja beberapa informan yang dinilai berkompeten yaitu yang benar-benar memahami masalah yang diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

- Studi kepustakaan/literasi

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

- Studi Lapangan

1. Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan data tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Dengan menggunakan metode observasi lapangan langsung, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan dan kondisi tempat penulis melakukan penelitian yaitu di desa beber Kecamatan ligung kabupaten majalengka, dan mencatat semua informasi yang ada yang mendukung penyusunan proposal ini. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Manfaat lain dari observasi ini peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistic atau menyeluruh.

2. Wawancara/Interview

Wawancara/ interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam.

Informan yang peneliti wawancarai pada penelitian ini adalah beberapa aparat desa beber, dan beberapa warga desa beber.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Menurut Moleong. Kriteria keabsahan data ada empat macam, yaitu (1) kepercayaan (*credibility*), (2) Keterahilan (*transferability*), (3) Kebergantungan (*dependability*), (4) Kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian Kualitatif ini memakai 3 macam antara lain :

1) Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Peneliti kembali ke lapangan. melakukan pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang diteliti ataupun dengan narasumber yang baru.

2) Keteralihan (*transferability*)

Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3) Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk Menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan melalui audit dependability oleh dosen pembimbing.

4) Kepastian (*confermability*)

Kriteria ini di gunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

1.8.5 Teknik Analisis Data

1) Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan.

2) Display data

Display data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

3) Verifikasi data

Verifikasi data adalah proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan, yang kemudian haruslah diolah dan dianalisis agar diuji secara hipotesis penelitian yang telah diteliti.

4) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan di maknai sebagai penarikan arti data yang telah di tampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, dan merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.

Peneliti memilih lokasi penelitian yang bertempat di Desa Beber Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dengan alasan sebagai berikut :

1. Ada masalah di lokasi penelitian yang harus dipecahkan atau di beri solusinya.
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh.
3. Lokasi penelitian terjangkau.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang dimulai pada bulan Maret 2022 hingga bulan Juli 2022, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian data akhir dan meminta data saat penulis membutuhkan. Adapun jadwal penelitiannya sebagai berikut :

